

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)**

**(Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung
Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

SYNTIA BELA TAMA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)

Oleh

Syntia Bela Tama

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis komparasi partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan program BSPS partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai dinilai kurang partisipatif sedangkan di Kelurahan Gunung Sulah partisipasi masyarakat dinilai lebih aktif. Faktor pendorong yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai yaitu sosialisasi sedangkan di Kelurahan Gunung Sulah adalah akses informasi, keahlian dan keterampilan serta sosialisasi dan rangsangan dari berbagai pihak. Faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai yaitu: keterbatasan swadaya masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, lemahnya pemahaman masyarakat dan kesibukan masyarakat sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kelurahan Gunung Sulah yaitu: keterbatasan dana dan keterbatasan waktu. Saran penelitian, perlu adanya program pinjaman Dana dari pemerintah sebagai kebijakan khusus demi terlaksananya program BSPS, melakukan pendekatan personal kepada masyarakat serta sebaiknya pemerintah menambahkan *design* dalam program ini untuk menjangkau masyarakat yang sulit diajak berpartisipasi

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRACT

Community Participation in the Self-Help Housing Stimulus Support Program (BSPS) (Comparative Study in Way Halim Permai and Gunung Sulah village, District of Way Halim, Bandar Lampung City)

BY

Syntia Bela tama

The Self-Supported Housing Stimulus Support Program (BSPS) is a government facilitation in the form of financial assistance provided to the Low Income Community (MBR) to assist in the implementation of the construction of adequate housing and housing in a safe and healthy environment independently. The purpose of this study is to describe and analyze the comparative participation of the community and the factors that influence community participation. The method used in this research is qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation.

The result of the research shows that in the implementation phase of BSPS program, community participation in Way Halim Permai Village is considered less participative while in Kelurahan Gunung Sulah community participation is considered more active. The driving factors affecting community participation in Way Halim Permai Village are socialization, while in Gunung Sulah urban village is access to information, skill and skill as well as socialization and stimulation from various parties. Inhibiting factors of community participation in Way Halim Permai urban village are limited people's awareness, low level of public awareness, weak understanding of society and community's busyness, while the inhibiting factors of community participation in Gunung Sulah urban areas are limited funds and time constraints. Suggestion of research, the need of Government fund loan program as a special policy for the implementation of the program BSPS, personal approach to the community and the government should add design in this program to reach people who are difficult to participate.

Keywords: Community Participation, Self-Help Housing Stimulation Program, Low Income Society

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)**

**(Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung
Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)**

Oleh

SYNTIA BELA TAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2017

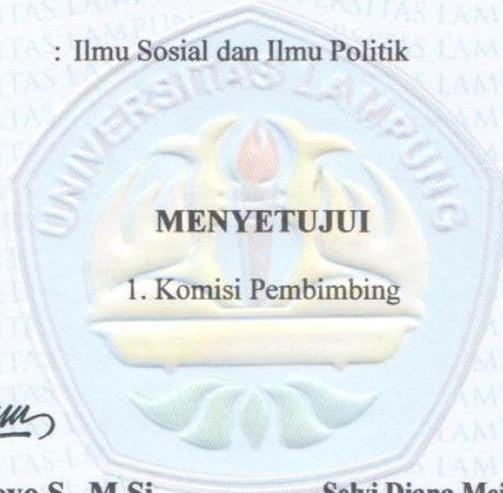
Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) (Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Syntia Bela Tama**

No. Pokok Mahasiswa : 1316041069

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.
NIP 19630206 198803 1 002

Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.

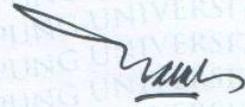
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

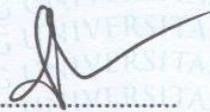
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

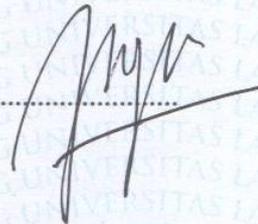
Ketua : Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.



Sekretaris : Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.



Penguji Utama : Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19690803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Oktober 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



Syntia Bela Tama

NPM. 1316041069

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syntia Bela Tama, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 09 Maret 1995. Penulis merupakan anak Pertama dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Beni Apriyadi dan Ibu Yusnarita. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Amoeng Putra Jl. Danau Toba, Gunung Sulah tahun 2000-2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 Way Halim Permai pada tahun 2001-2007. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) penulis tempuh di SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2007-2010. Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2010-2013.

Pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada Bulan Januari 2016, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Teba Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus selama 60 hari.

MOTTO

*Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu, selepas
banyak kesabaran yang kamu jalani, yang akan
membuatmu terpana, hingga kau lupa betapa
pedihnya rasa sakit*

(Ali bin Abi Thalib)

*Hasil terbaik adalah dari seberapa banyak kita
berdo'a dan seberapa jauh kita berusaha*

(Syntia Bela Tama)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku:

Ayahanda Beni Apriyadi dan Ibunda Yusnarita

yang selalu mencintai, menyayangi, mengasahi serta mendoakanku dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Serta adik-adikku tersayang

Rahmad Yusup

Senja Pramudita

Rara Adhana Tasya

Aura Saputri

Rizki Ramadhan

yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para Pendidik dan Almamaterku tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahuwata'ala
2. Nabi Muhammad SAW

3. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Beni Apriyadi dan Ibunda Yusnarita. Terimakasih atas kasih sayang yang telah Papa dan Mama berikan kepadaku, terima kasih atas semua do'a, mendukung, pengorbanan dan didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang. Terimakasih atas keparcayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara. Semoga dengan mendapatkan gelar S.A.N ini aku bisa membahagiakan Papa dan Mama, Aamiin.
4. Adikku Rahmad Yusup, Senja Pramudia, Rara Adhana Tasya, Aura Saputri dan Rizki Ramadhan yang telah memberi semangat, do'a dan dukungan kepada yunda kalian ini dalam penyelesaian skripsi. Terimakasih untuk adik-adikku yang paling yunda sayang. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses agar menjadi kebanggaan orang tua dan dapat membahagiakan Papa dan Mama serta mengangkat derajat keluarga kita, Aamiin.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A. Ph.D selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA), terimakasih Bapak telah turut membantu memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.

9. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat, saran, motivasi serta semangat. Terimakasih Bapak atas bimbingan serta pelajaran berharga yang telah Bapak berikan sehingga saya mampu menjadi pribadi yang lebih kuat dan ikhlas dalam menghadapi segala rintangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.PA selaku dosen pembimbing kedua yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih ibu dengan semua motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat waktu.
11. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si selaku dosen pembahas dan penguji. Terimakasih Ibu telah memberikan banyak arahan, kritikan, nasihat, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berkat bantuan dari Ibu selaku dosen pembahas.
12. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas semua ilmu yang berharga yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu yang sudah didapat menjadi bekal yang berharga dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
13. Bapak Azhari, S.I.Kom dan Ibu Nur'aini selaku Staf Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dan kelancaran administrasi kepada penulis sampai penyelesaian skripsi ini.

14. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
15. Segenap Informan Penelitian: Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Martoni selaku Kasubid Potensi Kelurahan BPMPK Kota Bandar Lampung, Staff Kecamatan Way Halim, Ibu Elia selaku Lurah Kelurahan Way Halim Permai, Bapak Pranomo selaku Lurah Kelurahan Gunung Sulah, serta seluruh para Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah. Terimakasih atas segala bantuannya dalam memberikan segala informasi yang diperlukan bagi penulis.
16. Keluarga besarku, Datuk Damhuri, Incik Linda, Tuan Apriyanto, Wo Cicin, adek Friska serta sepupu-sepupuku, terimakasih atas semua do'a serta dukungan yang telah kalian berikan kepadaku.
17. Teman kecilku Eka Fatmawati, terimakasih iik telah menjadi teman terbaik hingga saat ini yang selalu mensupport dalam segala hal termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedepannya kita bisa sukses bersama dan silaturahmi kita selalu terjaga degan baik.
18. Sahabatku sedari TK Aprilia Nurita Sari, terimakasih tata atas kebersamaan, dukungan dan motivasinya dalam perjuangan menempuh pendidikan. Semoga kita bisa mencapai cita-cita yang kita impikan bersama.
19. Sahabat-sahabatku semasa SMA, Gita Andini Putri, I'ia Elfa Liza, dan Ruri Anita. Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan kesah ku dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi. Semoga silaturahmi diantara kita selalu terjaga hingga kita bisa sukses bersama.

20. Sahabatku Ade Maulidya, S.A.N, terimakasih untuk pertemanan kita ± 4 tahun selama perkuliahan ini. Maaf selalu direpotkan dalam segala hal, menjadi tempat mencurahkan isi hati, kesedihan dan kesusahan. Semoga kedepannya silaturahmi kita selalu terjaga. Sukses dikemudian hari adalah impian kita, tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan selain doa terbaik untuk mu.
21. Sahabat-sahabatku Dessy Nindya dan Wiza Yuli Avio Nanda, terimakasih kalian sudah menjadi sahabat yang selalu ingin direpotkan. Support yang kalian berikan mampu mengubah ku untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan meraih kesuksesan bersama.
22. Keluarga Pucuk Cempaka yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana: Diah Puji Lestari, Indah Wahyuni, Pepy Cellya, Putri Aphrodite, Pratiwi Iswari, Oca Pawalin, dan Rijkiana Nuansa. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini, kalian yang terbaik selalu ada disaat senang maupun susah dan menghiburku dikala gundah.
23. Teman-temanku Fitria Ana Luse dan Khairunisa Afsari Nurfadilah, terimakasih atas kebersamaan, candaan dan waktunya selama ini. Semoga kita bisa wisuda dan meraih kesuksekan bersama.
24. Teman-temanku diawal perkuliahan: Andan Rahayu, Arinta Fitriani, Desti Eka Rahmawati, Meilika Ardyuansyah, Nurhafifah Zulta dan Rindu Nova Daria Putri. Terimakasih untuk kebersamaannya maaf jika selama ini belum bisa menjadi teman yang baik, semoga kedepannya silaturahmi diantara kita selalu terjaga dan kita bisa meraih kesuksesan bersama Aamiin.

25. Teman-teman KKN Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus: Dimas Satria Sanjaya, Dwi Sugeng, Rasyid Hakim, Rika Muhdayani, Wayan Nila, dan Yustiansyah. Terimakasih teman-teman atas dukungan kalian semua aku bisa nyelesain skripsiku dengan tepat waktu. Terimakasih selama KKN dua bulan kita saling menghargai, mengajarkan aku dalam bermasyarakat dengan baik, memaklumi satu sama lain dan senang sedih kita lalui bersama-sama.
26. Terimakasih untuk Tengku Abdi Pratama atas motivasi, serta dukungannya yang tiada henti. Terimakasih selalu ada dan menemani dari awal skripsi ini disusun hingga selesai dan berakhirnya skripsi ku. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama kedepannya.
27. Teman-Teman Seperjuangan Alas Menara.
28. Adik-adik angkatan 2014: Ana Ubaisah, Atiyatun Nasyiah dan Mia Arta Oktavia. Terimakasih dukungannya semoga kalian cepat menyusul adik-adikku.
29. Abang dan Mba Administrasi Negara.
30. Para pembahas mahasiswa dan moderatorku dari proposal sampai hasil (Asti Rahweni dan Tiara Novita) Terimakasih telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
31. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya belajar di Universitas Lampung.
32. Semua Pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

BandarLampung, 13 Oktober 2017

Penulis

Syntia Bela Tama

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat	14
1. Konsep Partisipasi Masyarakat	14
2. Tahapan Partisipasi Masyarakat	16
3. Jenis Partisipasi Masyarakat	19
4. Tingkat Partisipasi Masyarakat	22
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	26
B. Tinjauan tentang Kebijakan Publik	29
C. Tinjauan tentang Modal Sosial	30
D. Tinjauan Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	32
1. Pengertian dan Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	32
2. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	34
E. Keaslian Penelitian	38
F. Kerangka Pikir	41

III. METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	50
G. Teknik Keabsahan Data	52
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	54
1. Sejarah Kota Bandar Lampung	54
2. Letak Geografi	55
3. Penduduk	58
B. Gambaran Umum Kecamatan Way Halim	58
1. Sejarah Kecamatan Way Halim	58
2. Letak Geografi	59
3. Penduduk	60
C. Gambaran Umum Kelurahan Way Halim Permai	61
1. Sejarah Kelurahan Way Halim Permai	61
2. Letak Geografi	64
3. Data Penduduk	65
D. Gambaran Umum Kelurahan Sulah	67
1. Sejarah Kelurahan Gunung Sulah	67
2. Letak Geografi	68
3. Data Penduduk	69
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Hasil Penelitian	71
1. Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	71
a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	75
b. Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan	93
c. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pemanfaatan Hasil	100
d. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Kegiatan	105
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	112
a. Faktor Pendorong	112
b. Faktor Penghambat	116

B. Pembahasan	122
1. Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	126
a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.....	127
b. Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan	130
c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil	133
d. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Kegiatan	135
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	136
a. Faktor Pendorong	136
b. Faktor Penghambat	137
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Panduan Wawancara
- B. Tabel Triangulasi
- C. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung
- D. Surat Izin Penelitian Kecamatan Way Halim
- E. Daftar Penerima Bantuan BSPS Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tahun 2011-2015 Kota Bandar Lampung
- F. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung
- G. Surat Keputusan Lurah Way Halim Permai Kecamatan Way Halim
- H. Daftar Penerimaan Bahan Bangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap 1 (Satu) Kelurahan Way Halim Permai

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Atau Kota Di Provisnsi Lampung Tahun 2009-2013	5
Tabel 2. Data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20011, 2014 dan 2015 Kota Bandar Lampung	8
Tabel 3. Tahap Pelaksanaan Partisipasi Menurut Cohen Dan Uphoff Tahap Deskripsi	18
Tabel 4. Ragam Partisipasi Masyarakat	20
Tabel 5. Tingkat Partisipasi Menurut Peter Oakley	24
Tabel 6. Tabel Tangga Partisipasi	25
Tabel 7. Daftar Informan Terkait Pelaksanaan Program BSPS	48
Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	60
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	61
Tabel 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	65
Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	66
Tabel 14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	66
Tabel 15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	69
Tabel 16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 17. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	70
Tabel 18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	70
Tabel 19. Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Way Halim Permai Dan Kelurahan Gunung Sulah Tahun 2015	92
Tabel 20. Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Way Halim Permai Dan Kelurahan Gunung Sulah Tahun 2015	98
Tabel 21. Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Way Halim Permai Dan Kelurahan Gunung Sulah Tahun 2015	104
Tabel 22. Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Way Halim Permai Dan Kelurahan Gunung Sulah Tahun 2015	111
Tabel 23. Fokus Penelitian Tahapan Partisipasi	122
Tabel 24. Fokus Penelitian Jenis Partisipasi	123
Tabel 25. Fokus Penelitian Tingkat Partisipasi	124
Tabel 26. Fokus Penelitian Faktor Pendorong Partisipasi	124
Tabel 27. Fokus Penelitian Faktor Penghambat Partisipasi	125
Tabel 28. Matrik Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	146

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Trend Penduduk Miskin Menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung.....	6
Gambar 2. Tangga Partisipasi Arnstein.....	25
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	43
Gambar 4. Peta Kota Bandar Lampung	57
Gambar 5. Peta Kecamatan Way Halim	59
Gambar 6. Peta Lokasi Kelurahan Way Halim Permai	64
Gambar 7. Peta Kelurahan Gunung Sulah	68
Gambar 8. Kegiatan Survey Lapangan Program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai	79
Gambar 9. Kegiatan Survey Lapangan Program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai.....	80
Gambar 10. Kegiatan Sosialisasi di Tingkat Kelurahan Program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai.....	83
Gambar 11. Kegiatan Sosialisasi di Tingkat Kelurahan Program BSPS di Kelurahan Gunung Sulah	84
Gambar 12. Bahan Material Bangunan yang Diterima oleh Penerima Bantuan Kelurahan Way Halim Permai	91
Gambar 13. Bahan Material Bangunan yang Diterima oleh Penerima Bantuan Kelurahan Gunung Sulah	92
Gambar 14. Pelaksanaan Pembangunan Program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai.....	95
Gambar 15. Pelaksanaan Pembangunan Program BSPS di Kelurahan Gunung Sulah	97
Gambar 16. Alur Kerja Pembangunan Fisik BSPS di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah	100
Gambar 17. Realisasi Rumah Terbangun Program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai.....	102
Gambar 18. Realisasi Rumah Terbangun Program BSPS di Kelurahan Gunung Sulah	103
Gambar 19. Kegiatan Pemantauan Program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai.....	106
Gambar 20. Kegiatan Pemantauan Program BSPS di Kelurahan Gunung Sulah	107
Gambar 21. Kegiatan Evaluasi Program BSPS Kelurahan Way Halim Permai.....	108
Gambar 22. Kegiatan Evaluasi Program BSPS Kelurahan Gunung Sulah	109

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPMPK	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
DPA	: Dokumen Pelaksana Anggaran
DRPB2	: Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan
GK	: Gambar Kerja
KPB	: Kelompok Penerima Bantuan
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LKNB	: Lembaga Keuangan Non Bank
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
PB	: Pembangunan rumah Baru
Perda	: Peraturan Daerah
PK	: Peningkatan Kualitas
PSU	: Prasarana Sarana dan Utilitas umum
PT	: Perbaikan Total
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RPD	: Rencana Penggunaan Dana
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPM	: Tenaga Pendamping Masyarakat
UPK	: Unit Pelaksana Kerja
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu Negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, serta indikator yang sekaligus menjadi domain setiap Negara berkembang, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu yang menjadi hak dasar fundamental bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman yang tertera pada Pasal 28 H ayat 1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang.

Beberapa dekade terakhir, terjadi perkembangan penduduk di Indonesia yang demikian pesat. Hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa, mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%) serta di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%) (*Sumber: <http://www.bps.go.id> diakses pada Tanggal 08 April 2017*).

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan Indonesia yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan Kota yang kemudian menjadikan kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya perumahan dan pemukiman kumuh. Meluasnya perumahan dan pemukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana, serta lain sebagainya.

Perumahan dan pemukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu segera ditangani, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak huni dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Kondisi ini telah menjadi agenda penting pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa perumahan telah menjadi hak asasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Termasuk juga Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, Pasal 28 H Ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Masalah rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya, namun hal tersebut menjadi sebaliknya sehingga menimbulkan permasalahan baru.

Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan rumah layak huni maka perlu dibangun suatu sistem penyediaan rumah layak huni yang memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keterlibatan pemerintah melalui program atau kegiatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka.

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan sebuah program yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dibidang infrastruktur yang telah dimulai sejak tahun 2011 sampai sekarang. Program ini menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memang ditugaskan Presiden untuk menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan yang diberikan berupa bahan material bangunan dengan Dana senilai 15-30 juta sesuai dengan kondisi kerusakan bangunan yang akan diperbaiki.

Program bantuan ini dimaksudkan untuk mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) agar dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses MBR serta mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Tujuan program BSPS adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Melalui upaya ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta mengurangi persentase perumahan kumuh. Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih layak dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Bentuk pembangunan yang berkaitan dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembangunan program BSPS diseluruh Indonesia termasuk pemerintah daerah khususnya di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang cukup besar di Indonesia sehingga dirasa pantas untuk menerima program BSPS. Berikut ini adalah data mengenai persentase penduduk miskin yang tersebar di 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2009-2013.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

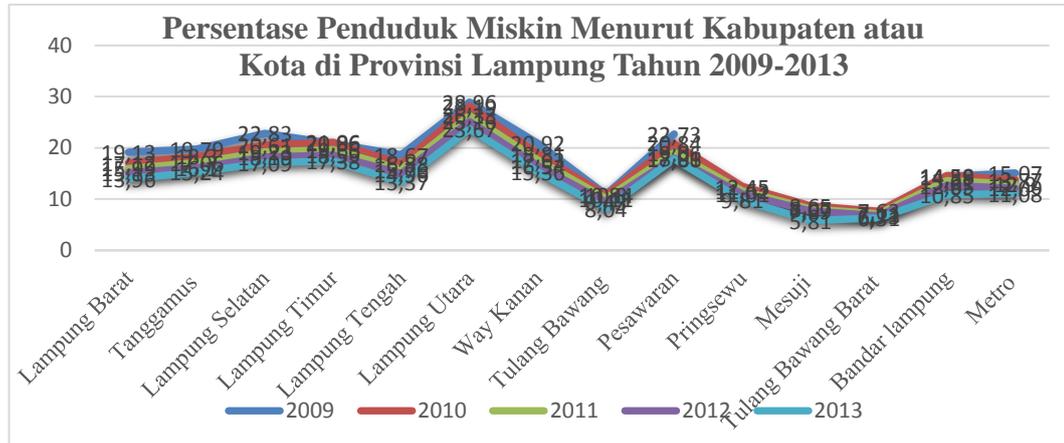
No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	19,13%	17,12%	15,99%	15,13%	13,96%
2.	Tanggamus	19,79%	18,30%	17,06%	16,1%	15,24%
3.	Lampung Selatan	22,83%	20,61%	19,23%	18,19%	17,09%
4.	Lampung Timur	20,86%	21,06%	19,66%	18,59%	17,38%
5.	Lampung Tengah	18,67%	16,88%	15,76%	14,96%	13,37%
6.	Lampung Utara	28,96%	28,19%	26,33%	25,16%	23,67%
7.	Way Kanan	20,92%	18,81%	17,63%	16,54%	15,36%
8.	Tulang Bawang	10,48%	10,80%	10,11%	9,43%	8,04%
9.	Pesawaran	22,73%	20,48%	19,06%	18,01%	17,86%
10.	Pringsewu	-	12,45%	11,62%	11,01%	9,81%
11.	Mesuji	-	8,65%	8,07%	7,69%	5,81%
12.	Tulang Bawang Barat	-	7,63%	7,11%	6,73%	6,31%
13.	Pesisir Barat	*	*	*	*	*
14.	Bandar Lampung	14,39%	14,58%	13,61%	12,65%	10,85%
15.	Metro	15,07%	13,77%	12,9%	12,09%	11,08%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2014

Berdasarkan table tersebut, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Bandar Lampung merupakan Kota dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi serta menduduki tingkat ke-9 dari 14 jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selama kurun waktu 2009-2013 telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di semua Kabupaten/Kota, hal ini dilihat dari adanya program-program Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin salah satunya program BPSPS itu sendiri.

Berikut ini adalah gambar *trend* penduduk miskin menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung tahun 2009-2013.

Gambar 1. Trend Penduduk Miskin Menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung tahun 2009-2013



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2017

Bandar Lampung merupakan salah satu Kabupaten atau Kota yang menerapkan program BSPS. Tujuan program BSPS adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Pemberdayaan berpusat pada rakyat sehingga rakyat berperan aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut dan mempercepat tujuan pembangunan, pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerbitkan Peraturan Walikota. Menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Pemukiman (UU KPK), Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman (Satker KPK) Provinsi Lampung mengadakan Rapat Pra Koordinasi Awal Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman kumuh di Bandar Lampung (*Sumber <http://ciptakarya.pu.go.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016*).

Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dimaksudkan untuk memberikan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman di Daerah. Setelah dilakukannya rapat dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, kemudian Walikota Bandar Lampung menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Kota Bandar Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi wewenang serta tanggung jawab sepenuhnya mengenai pelaksanaan program BPS di Kota Bandar Lampung. Berikut data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2011, 2014 dan 2015 Kota Bandar Lampung.

**Tabel 2. Data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Tahun 2011, 2014 dan 2015 Kota Bandar Lampung**

No.	Tahun	Kecamatan	Kelurahan	Total Anggaran	Jumlah Penerima
1.	2011	Kec.Teluk Betung Utara	Kel.Batu Putu	Rp. 5.000.000	50 Unit/Rumah
		Kec.Tanjung karang Barat	Kel.Sukadana Ham		
2.	2014	Kec.Teluk Betung Timur	Kel.Keteguhan	Rp. 7.500.000	420 Unit/Rumah
		Kec.Teluk Betung Barat	Kel.Negri Olok Gading		
3.	2015	Kec.Sukarame	Kel. Harapan Jaya	Rp.15.000.000	703 Unit/Rumah
			Kel.Sukarame	/PK 529 Unit	
			Kel. Way Dadi		
		Kec.Teluk Betung Timur	Kel. Sukamaju	Rp.30.000.000	
		Kec.Teluk Betung Barat	Kel.Sukarame II	/PB 174 Unit	
		Kec.Way Halim	Kel. Gunung Sulah	Total	
Kel.Way Halim Permai	Rp. 13.155.000.000				

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Kota Bandar Lampung tahun 2011, 2014, dan 2015

Berdasarkan tabel tersebut, Tahun 2015 merupakan jumlah rumah yang memperoleh Dana BSPS terbanyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di Kota Bandar Lampung. Anggaran yang diberikan juga berbeda dari tahun sebelumnya karena pada Tahun 2015 kategori penerima bantuan terdiri atas tiga kategori yaitu perbaikan ringan, sedang, dan berat. Kategori yang dimaksud tersebut dilihat dari seberapa besar kerusakan rumah yang dialami oleh penerima bantuan. Kerusakan tersebut dapat dilihat dari kondisi lantai, dinding maupun atap rumah. Kategori kerusakan ringan apabila salah satu dari lantai, dinding ataupun atap rumah mengalami kerusakan. Kategori kerusakan sedang apabila terjadi kerusakan pada dua bagian rumah yaitu lantai dan dinding, lantai dan atap atau dinding dan atap. Sedangkan kategori kerusakan berat yaitu memperbaiki seluruh bagian rumah berupa lantai, dinding dan atap rumah.

Pada Tahun 2015 terdapat 4 (empat) Kecamatan 7 (tujuh) Kelurahan dengan jumlah rumah yang mendapat bantuan sekitar 703 unit/rumah. Salah satu dari 4 (empat) Kecamatan yang mendapatkan bantuan program BSPS adalah Kecamatan Way Halim yang terdiri dari dua Kelurahan yaitu Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah. Oleh karena itu studi kasus pada penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Dua Kelurahan yang mendapatkan bantuan prasarana semuanya diwajibkan untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), namun kenyataannya terkadang hanya menjadi pelengkap persyaratan, sedangkan untuk pelaksanaannya baik berupa pertemuan atau kegiatan rutin partisipasi dari KPB dirasa kurang maksimal.

Konsep partisipasi telah lama menjadi bahan kajian dan telah meluas sehingga penggunaannya terkadang dipakai untuk visi misi suatu daerah. Konsep partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah tepat, karena sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Partisipasi dirasa sangat penting di dalam pembangunan karena masyarakat sebagai pelaku utama dan apabila pembangunan diharapkan berhasil dengan tepat waktu maka harus menyertakan masyarakat sebanyak mungkin jika tidak pembangunan akan terhambat. Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik pada lembaga dan proses pemerintahan sehingga dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.

Berpedoman pada materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, pada dasarnya keterlibatan masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik tetapi juga meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Perumahan swadaya tidak lagi diartikan secara sempit ketika keterlibatan mereka hanya pada saat membangun rumah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, secara terus terang dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah pada saat dilaksanakannya pembagunan dan perbaikan terlihat ada perbedaan partisipasi masyarakat diantara dua Kelurahan tersebut yaitu pada saat dilaksanakannya program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai partisipasi masyarakat dinilai kurang partisipatif karena keterbatasan swadaya masyarakat dan kecemburuan sosial yang masih dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai.

Sedangkan di Kelurahan Gunung Sulah partisipasi masyarakat dinilai lebih aktif dalam pelaksanaan program BSPS yaitu dengan menjalankan perannya untuk menggalang mengkoordinir partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif menyumbangkan tenaga, waktu dan pendanaan di dalam upaya untuk segera menyelesaikan pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut kiranya menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah komparasi partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis komparasi partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dilihat dari tahapan partisipasi masyarakat, jenis partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti, serta menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan maupun program dari pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi penyempurnaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Serta menjadi sarana informasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta pihak terkait dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui partisipasi masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat

1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi secara umum adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011: 50) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman dalam Dwiningrum (2011: 51) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

Menurut Bornby dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 81) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Selain itu, Beal dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 81) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan.

Sebagai suatu kegiatan Verhangen dalam Mardikanto dan Soebiato (2015:81-82) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
- c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
- d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang mengikutsertakan dirinya dalam suatu kegiatan yang bermanfaat, dalam menciptakan jaringan sosial baru untuk melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

2. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 82-84) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan antara lain:

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan program

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan.

Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional.

c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Sedangkan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 62) secara singkat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tahap Pelaksanaan Partisipasi Menurut Cohen dan Uphoff Tahap Deskripsi

Tahap	Deskripsi
1. Pengambilan Keputusan	Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana. Dalam suatu pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3. Pengambilan Manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4. Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Sumber: Dwiningrum, 2011: 63

Cohen dan Uphoff menyatakan ilmuwan dan politikus lebih memberikan perhatian pada jenis partisipasi pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki *wellbeing* masyarakat. Hal tersebut memerhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda akan menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.

Berdasarkan tahap partisipasi dari beberapa ahli tersebut, peneliti menggunakan tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, karena tahapan partisipasinya sesuai dengan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan melalui tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil dan mengevaluasi program.

3. Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara sederhana bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat memberikan sumbangan yang akhirnya dapat menunjang keberhasilan dari sebuah proyek atau program pembangunan. Dusseldorp dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d) Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- e) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- f) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Selain itu, Slamet dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 84-86) juga mengemukakan adanya keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan, seperti berikut:

1. Ikut memberi input, menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi semacam ini dapat dilihat pada keterlibatan masyarakat pelaksanaan proyek-proyek padat-karya untuk perbaikan jalan atau saluran pengairan oleh masyarakat setempat.

Tabel 4. Ragam Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang Ditunjukkan	Ragam Partisipasi				
	1	2	3	4	5
Memberikan input	+	+	+	-	+
Memberikan imbalan atas input yang diberikan	+	-	+	-	-
Menikmati manfaat hasil	+	+	-	+	-

Sumber: *Mardikanto dan Soebiato, 2015: 85*

2. Ikut memberikan input, tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, tetapi ikut memanfaatkan hasil pembangunannya. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada petani yang bergotong royong memperbaiki saluran air pengairan, atau anggota masyarakat yang bekerjasama membersihkan lingkungannya.
3. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Partisipasi seperti ini dapat dilihat pada para pekerja bangunan yang turut dalam pembangunan hotel-hotel berbintang namun meskipun para pekerja tersebut turut berpartisipasi dalam pembuatan hotel, mereka tidak akan turut menikmati hasil pembangunannya, karena tidak mampu membayar sewa hotelnya.
4. Ikut menerima imbalan dan menerima hasil pembangunan, tetapi tidak turut memberikan input. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada “pihak ketiga” dalam pelaksanaan pembangunan, meskipun partisipasi seperti ini sebenarnya tidak dikehendaki di dalam proses pembangunan.

5. Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini, bisa dilakukan oleh para penyumbang Dana (*donateur*) atau sponsor-sponsor kegiatan sosial.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Huraerah (2008: 102) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya yang diberikan partisipan dalam pertemuan, atau rapat.
2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu perbaikan atau pembangunan desa.
3. Partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan, dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
5. Partisipasi sosial, partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban.

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi. Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik nol partisipasi masyarakat sampai kendali masyarakat sepenuhnya. Untuk mempelajari massa proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi ini akan dijelaskan dengan menggunakan konsep lima tingkatan partisipasi menurut Wilcox dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 86) yaitu:

- a) Memberikan informasi (*information*);
- b) Konsultasi (*consultation*): yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- c) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan;
- d) Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- e) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Sementara itu, Dusseldorp dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 87) membedakan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya sebagai berikut:

- 1) Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri;
- 2) Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi;
- 3) Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau Norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya;
- 4) Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan;
- 5) Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan.

Secara khusus Peter Oakley dalam Dwiningrum (2011: 65), mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan yang dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 5. Tingkatan Partisipasi Menurut Peter Oakley

Tingkatan	Deskripsi
<i>Manipulation</i>	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indokrinasi.
<i>Consultation</i>	<i>Stakeholder</i> mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
<i>Consensus building</i>	Pada tingkat ini <i>stakeholder</i> berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahannya adalah individ- individu atau kelompok yang masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
<i>Decision Making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
<i>Partnership</i>	Memerlukan kerja secara <i>equal</i> menuju hasil yang mutual. <i>Equal</i> tidak sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.
<i>Self management</i>	Puncak dari partisipasi masyarakat. <i>Stakeholder</i> berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

Sumber: Dwiningrum, 2011

Jika dikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat dikaitkan dengan partisipasi sebagaimana dijelaskan Arnstein dalam Dwiningrum (2011: 64) dapat dibedakan ke dalam tabel sebagai berikut:

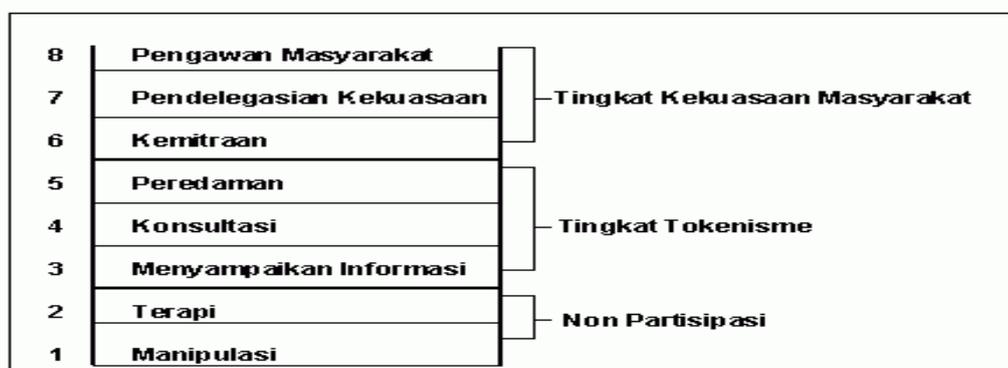
Tabel. 6 Tabel Tangga Partisipasi

KLASIFIKASI	URAIAN	TINGKATAN
<i>Citizen Power</i>	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan	Kontrol masyarakat (<i>citizen control</i>) Pelimpahan kekuasaan (<i>delegated control</i>) Kemitraan (<i>partnership</i>)
<i>Tokenism</i>	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Penetruman (<i>placation</i>) Konsultasi (<i>consultation</i>) Informasi (<i>information</i>)
<i>Non participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan objek	Terapi (<i>therapy</i>) Manipulasi (<i>manipulation</i>)

Sumber: Dwiningrum, 2011

Indikator-indikator partisipasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengukur partisipasi masyarakat yang efektif dalam kegiatan pemberdayaan. Agen pemberdayaan dapat menentukan jumlah indikator minimum atau indikator prioritas, indikator yang merepresentasikan proses partisipasi, serta sesuai dengan tujuan dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Berikut adalah gambar tangga partisipasi Arnstein:

Gambar 2. Tangga Partisipasi Anstein



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2017

Dari kedelapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Tidak ada peran serta atau *non participation* yang meliputi *manipulation* dan *therapy*.
2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism* yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power* yang meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.

Pada penelitian ini teori yang digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung adalah dengan menggunakan konsep tangga partisipasi menurut Arnstein.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi baik mendukung atau menghambat partisipasi tersebut. Menurut Slamet dalam Mardikanto dan Soebianto (2015: 91) menyatakan bahwa tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
- b) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
- c) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dwiningrum (2011: 57) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Sifat malas, apatis, tidak adanya kepedulian, dan tidak mau melakukan perubahan ditingkat anggota masyarakat;
- b. Aspek-aspek tipologis;
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya);
- d. Demografis (jumlah penduduk);
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Soetrisno dalam Mardikanto dan Soebiato (2015: 95) mengidentifikasi beberapa masalah kaitannya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- a. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - 1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatur) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
 - 2) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.

- 3) Partisipasi masyarakat sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya subsistem yang disubordinasikan oleh suprasistem; dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Masalah kedua adalah dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.
- c. Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

B. Tinjauan tentang Kebijakan publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone dalam Winarno (2012: 20) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Winarno (2012: 20) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Menurut Abdul Wahab dalam Sulistio (2009: 3) mengatakan bahwa kebijakan publik ialah tindakan (politik) apapun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya. Sedangkan W.I. Jenkins dalam Sulistio (2009: 3) memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya berada dalam batas-batas kekuasaan dari para aktor tersebut. Sulistio (2009: 3) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan Pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah sebagai aktor politik dalam mengatasi sebuah permasalahan publik yang kemudian tindakan tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikannya permasalahan.

C. Tinjauan tentang Modal Sosial

Modal sosial Menurut Syahra (2003: 3) mengatakan bahwa konsep modal sosial dapat diaplikasikan dalam upaya percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat sebagai salah satu langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Prinsip dasar dari modal sosial adalah bahwa hanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama yang dapat maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Suatu kelompok masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi mereka sendiri juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Dengan demikian modal sosial menekankan perlunya kemandirian dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, sementara bantuan dari luar dianggap sebagai pelengkap guna memicu inisiatif dan produktivitas yang muncul dari dalam masyarakat sendiri. Sebagai sebuah konsep sosiologis modal sosial merupakan pendekatan yang semakin intensif digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di banyak negara, termasuk di Indonesia”.

Coleman dalam Syahra (2003: 6) dalam bukunya yang berjudul *Foundations of Social Theory* mengatakan bahwa modal sosial, seperti halnya modal ekonomi, juga bersifat produktif. Tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Sebagaimana modal-modal lainnya, seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak selalu member manfaat dalam segala situasi, tetapi hanya terasa manfaatnya dalam situasi tertentu. Suatu bentuk modal sosial bisa bermanfaat untuk memudahkan seseorang melakukan tindakan dalam suatu situasi, tetapi dalam situasi lain tidak ada gunanya dan bahkan bisa menimbulkan kerugian.

Putnam dalam Syahra (2003: 9) menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. Pertama, adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Ketiga berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Fukuyama dalam Syahra (2003: 10) mengatakan bahwa kepercayaan muncul apabila masyarakat sama-sama memiliki seperangkat nilai-nilai moral yang memadai untuk menumbuhkan perilaku jujur pada warga masyarakat. Kelangsungan hidup organisasi dan kelembagaan besar ekonomi juga ditentukan oleh masyarakat sipil yang sehat dan dinamis, yang tergantung pula pada adat kebiasaan dan etika, sebagai hal-hal yang hanya bisa terbentuk secara tidak langsung dengan adanya kemauan, kesadaran yang semakin besar dan penghargaan terhadap budaya. Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial lebih menekankan pada hubungan antar manusia yang terlihat jelas dari adanya relasi dan interaksi diantara pihak yang terlibat, menekankan pada kemampuan manusia dalam kualitas diri yang ditunjukkan oleh kinerja yang nyata dapat diukur melalui pengetahuan, sikap dan keterampilan.

D. Tinjauan Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1. Pengertian dan Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Pembangunan rumah baru (PB) atau Perbaikan Total (PT) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang. Peningkatan Kualitas (PK) adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk meningkatkan/memenuhi syarat rumah layak huni.

(Sumber: <http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/PermenPUPR39-2015.pdf> diakses pada Tanggal 23 Agustus 2016).

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman. Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksudkan untuk mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) agar dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses MBR serta mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Sasaran penerima pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya adalah MBR. Sasaran program pemberian stimulan perumahan swadaya adalah:

- 1) Tersalurnya stimulan perumahan swadaya melalui LKM/LKNB di Kabupaten /Kota.
- 2) Tersalurnya stimulan perumahan swadaya kepada MBR yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan perumahan swadaya dengan jumlah maksimal yang ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja.
- 3) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 4) Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BSPS yang bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu. Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan ini sejak Tahun 2006 dan berhasil mencapai kesuksesan yang telah teruji dalam hal menjangkau bantuan bagi rumah tangga di pedesaan. Komponen ini akan mendukung penguatan dan ekspansi program BSPS yang bertujuan untuk mendukung 450.000 unit rumah yang akan menjangkau 1,8 juta penerima manfaat.

2. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Kriteria dan persyaratan dibagi menjadi tiga yaitu kriteria Kabupaten atau Kota, yang akan mendapatkan alokasi BSPS harus memenuhi kriteria umum dan atau kriteria khusus. Kriteria khususnya yaitu kabupaten atau Kota tersebut telah memiliki program khusus seperti program pembangunan percepatan nasional dan pelaksanaan direktif Presiden. Kriteria umum Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permen Kementerian PUPR Nomor 6 Tahun 2013 meliputi:

A. Kriteria Umum

1. Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional;
2. Jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional;
3. Jumlah kekurangan rumah (*backlog*) di atas rata-rata nasional;
4. Daerah tertinggal dan
5. Daerah perbatasan Negara

B. Kriteria Khusus

1. Program khusus
 - a) Pelaksanaan direktif Presiden
 - b) Termasuk program percepatan pembangunan nasional
 - c) Pelaksanaan kesepakatan (MoU); dan/atau
2. Terdapat perumahan dan permukiman kumuh
3. Memiliki Komitmen dalam pembangunan perumahan (tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) tahun berjalan)
 - a. Program Perumahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - b. Memiliki dana operasional

Kemudian syarat selanjutnya yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sebagai penerima BSPS adalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. WNI
2. MBR dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah dan menghuni rumah tidak layak huni
6. Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah
7. Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dibuktikan dengan:

- a) Memiliki tabungan bahan bangunan
 - b) Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan
 - c) Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
 - d) Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS
8. Bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPS
9. Dapat bekerja secara berkelompok

Setelah syarat sebagai penerima bantuan terpenuhi maka syarat yang harus dipenuhi selanjutnya akan dilihat dari kriteria obyek bantuan atau rumahnya sebagai berikut:

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
 - a. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
 - b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
 - c. Tidak dalam status sengketa, dan
 - d. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m²
3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau
4. Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
2. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
3. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
4. Rusak berat
5. Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m²

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa bahan bacaan yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat diantaranya adalah:

Pertama, skripsi dengan judul *Partisipasi Masyarakat Di Perkotaan Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Di Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*, yang disusun oleh Ayu Tsanita, Mahasiswa jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Agustus 2016. Permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. (2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan; partisipasi dalam tahap pelaksanaan; Partisipasi masyarakat dalam tahap Pemanfaatan hasil; dan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini sudah ada meskipun belum menyeluruh, masih ditemukan kendala-kendala yang menghambat partisipasi mulai dari keterbatasan Dana, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, lemahnya pemahaman masyarakat dan kesibukan masyarakat. Sehingga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara mengadakan rapat di jam-jam tertentu dengan melakukan pendekatan personal kepada masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam pembuatan pembukuan, perlu menyiapkan dana cadangan agar pembangunan yang berlangsung tidak terhambat apabila pencairan dana mengalami keterlambatan serta sebaiknya pemerintah menambahkan *design* dalam program ini untuk menjangkau masyarakat yang sulit diajak berpartisipasi.

Kedua, skripsi dengan judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Deskriptif di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*, yang disusun oleh Juniar Hanggara Prasetyawan, jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 2014. Permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui partisipasi masyarakat dalam program BSPS di Desa Cilibang, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program BSPS dilakukan secara langsung di tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasilnya. Jenis Partisipasi masyarakat terlihat sama pada tahap perencanaan serta tahap pemantauan dan evaluasi yaitu partisipasi buah pikiran. Dan pada tahap pelaksanaan jenis pasrtisipasinya terlihat beragam mulai dari partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial. Dan jenis partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasilnya hanya partisipasi sosial saja. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah *Citizen Power* yang ada pada tangga *Partnership*, *Delegated Power*, dan *Citizen Control*. Pada tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan hasilnya terlihat sama yaitu *Citizen Power* pada tangga *Citizen Control*. Tahap pemantauan dan evaluasi adalah *Citizen Power* pada tangga *Partnership*. Faktor pendorong yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program BSPS adalah akses informasi, keahlian dan keterampilan khususnya dalam bidang pembangunan, sosialisasi dan rangsangan dari berbagai pihak, serta modal untuk berswadaya. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program BSPS adalah keterbatasan modal swadaya, rendahnya tingkat pendidikan KPB, faktor usia, budaya penaggalan jawa dan kecemburuan sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu jika skripsi terdahulu hanya membahas tentang partisipasi masyarakat sedangkan pada skripsi peneliti membahas tentang perbandingan partisipasi masyarakat antara dua Kelurahan yaitu Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

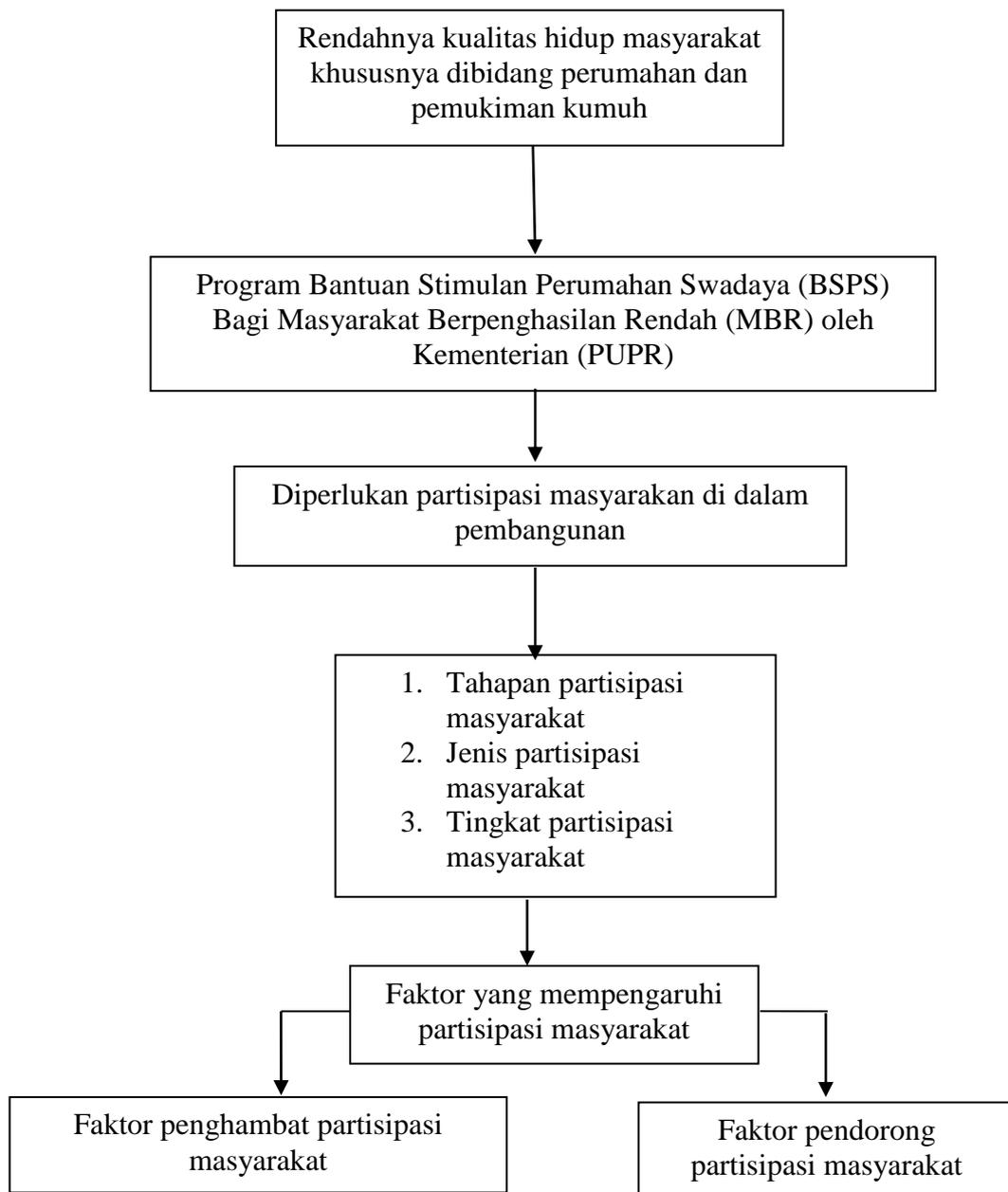
F. Kerangka Pikir

Peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya dibidang perumahan dan pemukiman kumuh merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia karena masih banyak penduduk Indonesia yang tinggal di daerah kumuh dan menempati rumah yang tidak layak huni. Meluasnya perumahan dan pemukiman kumuh telah menimbulkan dampak sosial seperti meningkatnya frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana pemukiman, dan lain sebagainya.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah perumahan dan pemukiman kumuh di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada MBR. Bantuan yang diberikan berupa bahan material bangunan dengan Dana senilai 15-30 juta sesuai dengan kondisi kerusakan bangunan yang akan diperbaiki. Partitipasi dirasa sangat penting di dalam pembangunan karena masyarakat sebagai pelaku utama dan apabila pembangunan yang diharapkan berhasil dengan tepat waktu maka harus menyertakan masyarakat sebanyak mungkin jika tidak pembangunan akan terhambat.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah dilihat dari *Pertama*, partisipasi masyarakat dilihat dari tahapan partisipasinya menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 62), yang membagi partisipasi masyarakat dalam 4 tahapan yaitu tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil dan mengevaluasi program. *Kedua*, partisipasi masyarakat yang dilihat dari jenis partisipasinya berdasarkan teori Huraerah (2008:102) yang membagi bentuk dan jenis partisipasi masyarakat menjadi partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemauan, serta partisipasi sosial. *Ketiga*, partisipasi masyarakat yang dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat menurut konsep tangga partisipasi Arnstein dalam Dwiningrum (2011: 64). *Keempat*, untuk mengetahui faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dilihat menurut teori dari Slamet dalam Mardikanto (2015: 91) yaitu adanya kesempatan yang diberikan, adanya kemauan partisipasi dan adanya kemampuan partisipasi. Dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dilihat menurut teori Dwiningrum (2011: 57) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Sifat malas, apatis, tidak adanya kepedulian, dan tidak mau melakukan perubahan ditingkat anggota masyarakat;
- b. Aspek-aspek tipologis;
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya);
- d. Demografis (jumlah penduduk);
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal).

Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2012: 93) yaitu bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan. Dengan demikian, pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Partisipasi masyarakat dilihat dari tahapan partisipasinya menurut Cohen dan Uphoff, karena tahap partisipasinya sesuai dengan tahap partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan melalui tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil dan mengevaluasi program.
2. Partisipasi masyarakat yang dilihat dari jenis partisipasinya berdasarkan teori Huraerah yang membagi bentuk dan jenis partisipasi masyarakat menjadi partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemauan, serta partisipasi sosial.
3. Partisipasi masyarakat yang dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat menurut konsep tangga partisipasi Arnstein.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dilihat menurut teori dari Slamet dalam Mardikanto (2015: 91) yaitu adanya kesempatan yang diberikan, adanya kemauan partisipasi dan adanya kemampuan partisipasi. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakatnya dilihat menurut teori Dwiningrum yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:
 - a. Sifat malas, apatis, tidak adanya kepedulian, dan tidak mau melakukan perubahan ditingkat anggota masyarakat;
 - b. Aspek-aspek tipologis;
 - c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya);
 - d. Demografis (jumlah penduduk);
 - e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah karena pada saat dilaksanakannya pembangunan serta perbaikan terlihat ada perbedaan partisipasi masyarakat diantara dua Kelurahan tersebut yaitu pada saat dilaksanakannya program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai partisipasi masyarakat dinilai kurang partisipatif karena keterbatasan swadaya masyarakat, dan kecemburuan sosial yang masih dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Sedangkan di Kelurahan Gunung Sulah partisipasi masyarakat dinilai lebih aktif dalam pelaksanaan program BSPS yaitu dengan menjalankan perannya untuk menggalang mengkoordinir partisipasi masyarakat serta ikut berperan aktif menyumbangkan tenaga, waktu, dan pendanaan di dalam upaya untuk segera menyelesaikan pembangunan. Jarak antara Kelurahan Way Halim Permai dengan Kelurahan Gunung Sulah yaitu $\pm 1,7$ km dengan waktu yang ditempuh ± 5 menit.

Pemilihan tempat tersebut juga didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain alasan teoritis dan praktis. Alasan teoritisnya adalah bahwa daerah tersebut dipandang peneliti dapat memberikan informasi yang cukup untuk penelitian ini. Sedangkan alasan praktisnya adalah alasan yang menyangkut hal-hal yang sifatnya praktis, seperti efektifitas biaya, waktu, serta tenaga mengingat peneliti tinggal di daerah tersebut.

D. Jenis Dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data dalam Purhantara (2010: 79) terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dalam Purhantara (2010: 79) dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang paling independen terhadap semua teknik pengumpulan data adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide* yang berupa daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian. Dalam wawancara tersebut peneliti mendatangi informan secara langsung ke lokasi dan mengadakan wawancara secara langsung terhadap informan.

Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam program BPS di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Informan yang diwawancarai pada penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dari Pemerintah Kelurahan, Lurah kelurahan Way Halim Permai, Lurah Gunung Sulah, Ketua RT di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah serta masyarakat penerima BPS.

Tabel 7. Daftar Informan Terkait Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

No. (1)	Informan (2)	Informasi (3)	Tanggal wawancara (4)
1.	Kasubid Potensi Kelurahan di BPMPK Kota Bandar Lampung	1. Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi 2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi	10 Oktober 2016

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Lurah Way Halim Permai dan Lurah Gunung Sulah	1. Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi 2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi	16 Mei 2017 dan 22 Mei 2017
3.	Ketua RT	1. Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi 2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi	22 Mei 2017
4.	Masyarakat penerima BPS Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah	1. Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi 2. Dampak yang dirasakan dengan adanya program ini	22 Mei 2017 dan 25 Mei 2017

Sumber: diolah oleh peneliti, 2016

2. Dokumentasi

Data ini biasanya sudah diolah atau ditabulasikan oleh Kantor dan pihak yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data atau literature, jurnal, skripsi dan surat kabar yang sesuai dengan bahasan penelitian.

3. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan terlebih dahulu). Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengamati dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program BPS dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian pelaksanaan program BSPS serta mana yang bukan. Kemudian peneliti memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksanaan program BSPS. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan mengenai pelaksanaan program BSPS dan transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 339) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data maka memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

c. Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 343) dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara serta berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang akurat.

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan program BSPS.

Reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan merupakan suatu proses yang saling terjalin sebelum, selama dan sesudah penelitian, serangkaian proses tersebut disebut analisis. Ketiga proses serta kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan suatu siklus dan interaktif.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data dalam Moleong (2012: 324) diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung. Provinsi Lampung pada awalnya merupakan keresidenan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kotanya yaitu Tanjungkarang-Telukbetung.

Sebelum Tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang nomor 14 Tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kotanya Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983 dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 Kecamatan dan 30 Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 Tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD Tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung kembali dimekarkan menjadi 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Terakhir pada Tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju dilakukan kembali peresmian kecamatan dan kelurahan baru di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.

2. Letak Geografi

Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5° 20" sampai dengan 5° 30" lintang selatan dan 105° 28" sampai dengan 105° 37" bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera.

Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran,
Kecamatan Ketibung dan Teluk Lampung.
- Sebelah Barat : Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran.
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung
Selatan.

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total wilayah, landai hingga miring meliputi 35% total wilayah dan sangat miring hingga curam meliputi 4% total wilayah.

- a. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau dibagian Selatan.
- b. Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame dibagian Utara.
- c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara.
- d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:

1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan panjang.
2. Daerah perbukitan yaitu sekitar teluk Betung bagian utara
3. Daerah daratan tinggi serta sedikit bergeleombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Ditengah-tengah Kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpung di wilayah tanjung Karang dan Way Kuripan, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai berada di bagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total wilayah, landai hingga miring meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4% total wilayah. Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya bernama; Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing, dan Gunung Kapuk.



Gambar 4. Peta Kota Bandar Lampung

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung, 2017

3. Penduduk

Secara administratif Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 20 Kecamatan, 126 Kelurahan, 285 Lingkungan, serta 2.718 RT. Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Sensus Penduduk Nasional yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 942.039 jiwa yang terdiri dari 475.039 jiwa penduduk laki-laki dan 467.000 jiwa penduduk.

B. Gambaran Umum Kecamatan Way Halim

1. Sejarah Kecamatan Way Halim

Kecamatan Way Halim sebelumnya merupakan wilayah dari Kecamatan Sukarame. Pada Tahun 2012 Kecamatan Sukarame mengalami pemekaran sehingga terbentuklah Kecamatan Way Halim yang terdiri atas 6 (enam) Kelurahan, antara lain:

- a. Kelurahan Prumnas Way Halim
- b. Kelurahan Way Halim Permai
- c. Kelurahan Gunung Sulah
- d. Kelurahan Jagabaya I
- e. Kelurahan Jagabaya II
- f. Kelurahan Jagabaya III

Berdasarkan pemekaran Wilayah Kota Bandar Lampung Tanggal 17 September 2012, maka kelurahan Jagabaya II yang sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Sukabumi dan setelah pemekaran wilayah, maka Kelurahan Jagabaya II masuk di Wilayah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

2. Letak Geografi

Kecamatan Way Halim terletak/berjarak 2 (dua) KM dari Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah Kecamatan 886.56 Ha.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Senang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Sukabumi
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Kecamatan Kedaton
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Sukarame



Gambar 5. Peta Kecamatan Way Halim

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017

3. Penduduk

Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kecamatan Way Halim Kota Bandar

Lampung dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut ini:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0 – 12 Bulan	307 Orang	315 Orang	39 Tahun	226 Orang	246 Orang
2.	1 Tahun	265 Orang	268 Orang	40 Tahun	216 Orang	194 Orang
3.	2 Tahun	350 Orang	401 Orang	41 Tahun	217 Orang	219 Orang
4.	3 Tahun	332 Orang	343 Orang	42 Tahun	243 Orang	247 Orang
5.	4 Tahun	542 Orang	377 Orang	43 Tahun	197 Orang	211 Orang
6.	5 Tahun	587 Orang	515 Orang	44 Tahun	189 Orang	211 Orang
7.	6 Tahun	387 Orang	401 Orang	45 Tahun	205 Orang	212 Orang
8.	7 Tahun	368 Orang	413 Orang	46 Tahun	187 Orang	219 Orang
9.	8 Tahun	393 Orang	377 Orang	47 Tahun	245 Orang	279 Orang
10.	9 Tahun	584 Orang	549 Orang	48 Tahun	239 Orang	259 Orang
11.	10 Tahun	393 Orang	382 Orang	49 Tahun	244 Orang	272 Orang
12.	11 Tahun	396 Orang	385 Orang	50 Tahun	203 Orang	249 Orang
13.	12 Tahun	369 Orang	357 Orang	51 Tahun	218 Orang	239 Orang
14.	13 Tahun	461 Orang	365 Orang	52 Tahun	221 Orang	228 Orang
15.	14 Tahun	714 Orang	701 Orang	53 Tahun	212 Orang	242 Orang
16.	15 Tahun	563 Orang	731 Orang	54 Tahun	216 Orang	245 Orang
17.	16 Tahun	558 Orang	587 Orang	55 Tahun	257 Orang	283 Orang
18.	17 Tahun	597 Orang	622 Orang	56 Tahun	251 Orang	269 Orang
19.	18 Tahun	449 Orang	487 Orang	57 Tahun	238 Orang	293 Orang
20.	19 Tahun	586 Orang	617 Orang	58 Tahun	248 Orang	177 Orang
21.	20 Tahun	588 Orang	624 Orang	59 Tahun	137 Orang	172 Orang
22.	21 Tahun	516 Orang	536 Orang	60 Tahun	67 Orang	78 Orang
23.	22 Tahun	472 Orang	520 Orang	61 Tahun	82 Orang	80 Orang
24.	23 Tahun	481 Orang	509 Orang	62 Tahun	59 Orang	55 Orang

Sumber: Data Monografi Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2016

Berdasarkan tabel jumlah penduduk kelompok umur Kecamatan Way Halim Tahun 2016. Jumlah penduduk terbanyak berumur 17 Tahun dengan jumlah penduduk 1.415 orang dan jumlah penduduk terendah berumur 62 Tahun dengan jumlah 114 orang.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Klasifikasi	Jumlah	
1.	Jumlah laki-laki	27.010	Orang
2.	Jumlah perempuan	27.168	Orang
3.	Jumlah total	54.178	Orang
4.	Jumlah kepala keluarga	13.272	KK

Sumber: *Data Monografi Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 201*

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk Kecamatan Way Halim berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1.	Islam	17.707 Orang	88,1%	20.847 Orang	89,1%
2.	Kristen	936 Orang	4,7%	1.039 Orang	4,4%
3.	Katolik	827 Orang	4,1%	851 Orang	3,7%
4.	Hindu	195 Orang	0,9%	192 Orang	0,8%
5.	Budha	439 Orang	2,2%	473 Orang	2,0%
6.	Jumlah	20.104 Orang	100%	23.402 Orang	100%

Sumber: *Data Monografi Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk Kecamatan Way Halim Permai mayoritas didominasi oleh warga beragama Islam sedangkan paling sedikit beragama Hindu.

C. Gambaran Umum Kelurahan Way Halim Permai

1. Sejarah Kelurahan Way Halim Permai

Kelurahan Way Halim Permai terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G//185/BIII/1988 Tanggal 6 juli 1988 tentang Pemecahan Kelurahan di Kota Bandar Lampung sebanyak 26 Kelurahan.

Didasari Keputusan tersebut khususnya Kecamatan Sukarame ada 3 Kelurahan yang dimekarkan, yaitu: Kelurahan Jagabaya II, Kelurahan Gunung Sulah dan Kelurahan Way Halim Permai.

Secara spesifik sejarah Kelurahan Way Halim Permai sebagai berikut:

1. Pada Tahun 1961, cikal bakal Kelurahan Way Halim Permai adalah Kelurahan Jagabaya. Pada saat itu masih berstatus desa dan merupakan bagian dari Desa Negara Balaw Kecamatan Natar.
2. Pada Tahun 1962, Desa Jagabaya dimekarkan menjadi dua, yaitu sebagian menjadi Desa Jagabaya II Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan 6 wilayah Rukun Kampung dan sebagian lagi menjadi Desa Jagabaya I Kecamatan TanjungKarang Timur Kotamadya Dati II Tanjungkarang-Telukbetung.
3. Pada Tahun 1966, Desa Jagabaya II mendapat tambahan wilayah yaitu susukan Gunung Sulah I dan II yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Surabaya.
4. Pada Tahun 1969 dengan terbentuknya Kecamatan Kedaton maka Desa Jagabaya II masuk wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan Desa Jagabaya I tetap pada wilayah Kecamatan TanjungKarang Timur.
5. Pada Tahun 1982, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Perubahan Wilayah, maka Kota Bandar Lampung diperluas dengan pemerkanan dari 4 Kecamatan 30 Kelurahan menjadi 9 Kecamatan 58 Kelurahan. Kelurahan Jagabaya II menjadi bagian dari Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

6. Pada Tahun 1988, setelah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor G/185.B.111/HK/1988 Tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 Tentang Pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan. Kelurahan Jagabaya II dimekarkan, salah satunya adalah Kelurahan Way Halim Permai dan menjadi bagian dari Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.
7. Pada Tahun 2001, didasari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan. Kelurahan Way Halim Permai tetap menjadi bagian dari Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.
8. Pada Tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan maka Kelurahan Way Halim Permai menjadi bagian dari Kecamatan Way Halim.
9. Pada Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturab Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 20112 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan maka terdapat penambahan Wilayah Kelurahan Way Halim Permai yakni 10 RT BTN 3 dari Kelurahan Way Dadi dan 3 RT dari Kelurahan Sukarame. Adanya peraturan ini membuat Kelurahan Way Halim Permai memiliki 3 Lingkungan dan 38 RT.

2. Letak Geografi

Kelurahan Way Halim Permai berada di tengah-tengah Kota Bandar Lampung dan berdekatan dengan Kecamatan Way Halim. Kelurahan Way Halim Permai memiliki posisi yang strategis karena merupakan daerah kompleks perumahan serta didominasi oleh jasa dan perdagangan. Kelurahan Way Halim Permai memiliki luas wilayah 220 Ha dengan ketinggian lebih kurang 750 m dari permukaan laut. Secara administratif batas daerah Kelurahan Way Halim Permai adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Perumnas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sulah, Kelurahan Jagabaya III dan Kelurahan Kali Balau Kencana
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kedaton
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Sukarame.

Topografi Kelurahan Way Halim Permai terdiri atas dataran dan sungai. Sungai terletak dibagian selatan yang berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sulah. Sungai tersebut merupakan batas antar kelurahan. Sungai tersebut dinamakan Sungai Way Halim.



Gambar 6. Peta Lokasi Kelurahan Way Halim Permai

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2017

3. Data Penduduk

Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut ini:

Tabel 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	2012	Persentase	2013	Persentase
1.	0 – 12 Bulan	170 Orang	1,7%	192 Orang	1,4%
2.	> 1 - < 5 Tahun	1.087 Orang	10,9%	1.537 Orang	11,6%
3.	≥ 5 - < 7 Tahun	321 Orang	3,2%	571 Orang	4,3%
4.	≥ 7 - ≤ 15 Tahun	2.394 Orang	23,9%	3.504 Orang	26,5%
5.	> 15 – 56 Tahun	5.383 Orang	53,7%	6.567 Orang	49,5%
6.	> 56 Tahun	665 Orang	6,6%	890 Orang	6,7%
Jumlah		10.020 Orang	100%	13.261 Orang	100%

Sumber: Data Monografi Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2013

Berdasarkan Tabel diatas maka diketahui bahwa perkembangan paling signifikan adalah rasio umur $\geq 7 - \leq 15$ Tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 1.110 orang sedangkan rasio umur 0 – 12 Bulan dengan peningkatan 12 orang.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Klasifikasi	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk	10.020 Orang	13.261 Orang
2.	Jumlah Laki-Laki	5.056 Orang	6.573 Orang
3.	Jumlah Perempuan	4.976 Orang	6.688 Orang
4.	Jumlah KK	2.166 Orang	3.018 Orang

Sumber: Data Monografi Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk Kelurahan Way Halim Permai berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	2012		2013	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Islam	7.498	74,8%	10.527	79,4%
2.	Protestan	1.068	10,7%	1.148	8,7%
3.	Katolik	1.065	10,6%	1.145	8,6%
4.	Hindu	98	1%	129	0,9%
5.	Budha	292	2,9%	312	2,4%
Jumlah		10.020	100%	13.261	100%

Sumber: Data Monografi Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk Kelurahan Way Halim Permai mayoritas didominasi oleh warga beragama Islam sedangkan paling sedikit beragama Hindu.

Tabel 14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	2013	
		Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	1.313	18,6%
2.	TNI/Polri	291	4,1%
3.	Swasta	685	9,7%
4.	Wirawasta/Pedagang	1.735	24,6%
5.	Tukang	575	8,2%
6.	Buruh	1.377	19,5%
7.	Pensiunan	747	10,6%
8.	Jasa	335	4,7%
Jumlah		7.058	100%

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Way Halim Permai mayoritas didominasi oleh warga yang bekerja sebagai wirawasta/pedagang sedangkan paling sedikit bekerja sebagai TNI/Polri.

D. Gambaran Umum Kelurahan Gunung Sulah

1. Sejarah Kelurahan Gunung Sulah

Kelurahan Gunung Sulah sebelumnya merupakan wilayah Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukarame. Pada Tahun 1989 Kelurahan Jagabaya II mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Jagabaya II
- b. Kelurahan Gunung Sulah
- c. Kelurahan Way Halim

Dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor: 821.20/12/12/1989 Tanggal 05 Agustus 1989 Kelurahan Gunung Sulah dengan Luas wilayah 98 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) Lingkungan dan 32 RT (Rukun Tetangga).

Wilayah Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukarame. Pada Tanggal 16 September 2012 terjadi pemekaran wilayah Kecamatan menjadi:

1. Kecamatan Sukarame
2. Kecamatan Way Halim

Dengan perturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 01 Tahun 2013 Tanggal 06 Agustus 2014 Kecamatan Way Halim sejak saat itu Kecamatan Way Halim telah memisahkan diri dari Kecamatan Sukarame.

2. Letak Geografi

Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim terletak/berjarak 2 (dua) KM dari Kecamatan Way Halim dengan luas wilayah Kelurahan 98 Ha.

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Way Belau Kelurahan Way Halim Permai

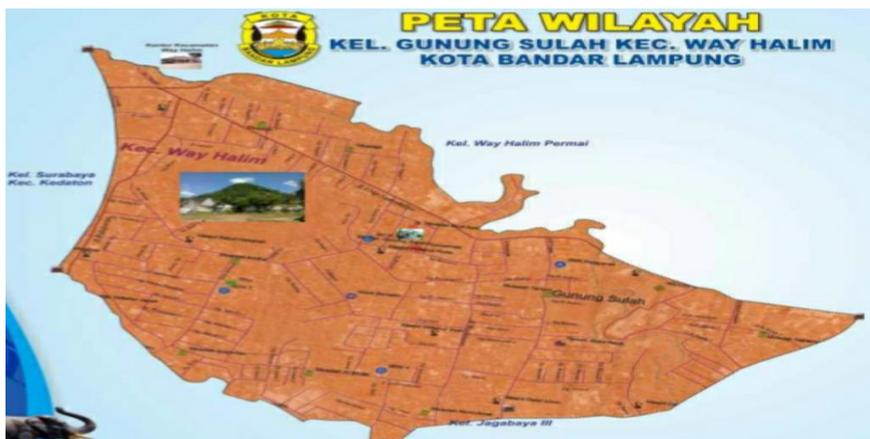
Sebelah Selatan : Sungai Kelurahan Jagabaya II

Sebelah Barat : Kelurahan Surabaya (Rek Kereta Api)

Sebelah Timur : Kelurahan Jagabaya III

Adapun Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim meliputi 3 (tiga) Lingkungan dan 32 RT (Rukun Tetangga) yakni:

1. Lingkungan I dengan Kepala Lingkungan Bapak Gani MZ
2. Lingkungan II dengan Kepala Lingkungan Bapak Selamat Harsono
3. Lingkungan III dengan Kepala Lingkungan Bapak Sujiran



Gambar 7. Peta Kelurahan Gunung Sulah

Sumber: Data Monografi Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2016

3. Data Penduduk

Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way

Halim Kota Bandar Lampung dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut ini:

Tabel 15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	2014	Persentase	2015	Persentase
1.	0 – 12 Bulan	170 Orang	1,7%	186 Orang	1,6%
2.	> 1 - < 5 Tahun	1.087 Orang	10,8%	1.137 Orang	10%
3.	≥ 5 - < 7 Tahun	321 Orang	3,2%	546 Orang	4,9%
4.	≥ 7 - ≤ 15 Tahun	2.394 Orang	23,9%	2.894 Orang	25,5%
5.	> 15 – 56 Tahun	5.383 Orang	53,7%	5.783 Orang	51%
6.	> 56 Tahun	665 Orang	6,7%	790 Orang	7%
Jumlah		10.020 Orang	100%	11.336 Orang	100%

Sumber: Data Monografi Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2016

Berdasarkan Tabel diatas maka diketahui bahwa perkembangan paling signifikan adalah rasio umur $\geq 7 - \leq 15$ Tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 500 orang sedangkan rasio umur 0 – 12 Bulan dengan peningkatan 16 orang.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Klasifikasi	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk	10.020 Orang	11.336 Orang
2.	Jumlah Laki-Laki	5.056 Orang	5.585 Orang
3.	Jumlah Perempuan	4.976 Orang	5.751 Orang
4.	Jumlah KK	2.472 Orang	2.969 Orang

Sumber: Data Monografi Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk Kelurahan Gunung Sulah berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Tabel 17. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	2014		2015	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Islam	7.498	74,8%	10.528	92,8%
2.	Protestan	1.068	10,7%	351	3,09%
3.	Katolik	1.065	10,6%	442	3,89%
4.	Hindu	98	1%	5	0,04%
5.	Budha	292	2,9%	10	0,08%
Jumlah		10.020	100%	11.336	100%

Sumber: Data Monografi Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Bandar Lampung tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk Kelurahan Way Gunung Sulah mayoritas didominasi oleh warga beragama Islam sedangkan paling sedikit beragama Hindu.

Tabel 18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	2015	
		Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	1.382	12,2%
2.	TNI/Polri	806	7,1%
3.	Swasta	1.308	11,5%
4.	Wirawasta/Pedagang	1.235	10,9%
5.	Tukang	1.575	13,9%
6.	Buruh	2.140	18,9%
7.	Pensiunan	847	7,5%
8.	Jasa	1.335	11,8%
9.	Pengrajin	81	0,7%
10.	Pekerja Seni	41	0,4%
11.	Lainnya	586	5,1%
Jumlah		11.336	100%

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Gunung Sulah mayoritas didominasi oleh warga yang bekerja sebagai buruh sedangkan paling sedikit bekerja sebagai pekerja seni..

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat dilaksanakannya pembangunan dan perbaikan terlihat ada perbedaan partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah. Pada saat pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai partisipasi masyarakat dinilai kurang partisipatif karena keterbatasan swadaya masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, lemahnya pemahaman masyarakat serta kesibukan masyarakat.

sedangkan di Kelurahan Gunung Sulah partisipasi masyarakat dinilai lebih aktif dalam pelaksanaan program BSPS. Hal ini dikarenakan Kelurahan Gunung Sulah memiliki modal sosial melalui kegiatan rutin gotong-royong yang hingga saat ini masih berlangsung di Kelurahan Gunung Sulah. Modal sosial dibutuhkan dalam pelaksanaan program BSPS karena modal sosial diharapkan mampu meningkatkan rasa saling percaya sehingga masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program BSPS. Apabila masyarakat sudah memiliki rasa saling percaya satu sama lain, maka penerima bantuan akan merasa terbantu dengan adanya kegiatan gotong-royong sebagai modal sosial.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran mengenai partisipasi masyarakat dalam program BSPS di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah antara lain:

1. Karena sifat Dana bantuan BSPS yang hanya boleh digunakan sebagai Dana pembelian bahan bangunan saja maka perlu adanya program pinjaman Dana dari pemerintah sebagai kebijakan khusus demi terlaksananya program BSPS. Agar masyarakat penerima bantuan tidak menjual harta benda mereka yang dijadikan sebagai modal penghasilan mereka sehari-hari dan dijual hanya untuk membiayai pelaksanaan program BSPS ini.
2. Baik UPK dan TPM perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka memahami dan mengetahui program ini adalah program dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat banyak melalui partisipasi masyarakat yang aktif, serta mengajak masyarakat untuk tetap ikut berpartisipasi ditengah kesibukannya.
3. Pemerintah perlu menambahkan *design* dalam program ini untuk menjangkau masyarakat yang sulit diajak dalam berpartisipasi agar dapat berpartisipasi melalui penyadaran, pelatihan dan melakukan wawancara untuk mengetahui latar belakang masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hanggara Prasetyawan, Juniar. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Deskriptif di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong J, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posda karya.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusydi Syahra. 2003. *Modal sosial : Konsep dan aplikasi*. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5 No. 1
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. 2009. *Kebijakan Publik (Public Policy) Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*. Lampung.
- Tsanita, Ayu. 2016. *Partisipasi Masyarakat di Perkotaan dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung (Studi di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Website:

<http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/PermenPUPR39-2015.pdf> diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 18.26 WIB.

<http://ciptakarya.pu.go.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 18.45 WIB.

<http://lampung.bps.go.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 14.53 WIB.

<http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 08 April 2017 pukul 13.25 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung diakses pada Tanggal 02 Juni 2017 pukul: 15.20 WIB.

<https://kelurahangunungsulah.wordpress.com/> diakses pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 09.23 WIB.

Sumber Lain:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 06 Tahun 2013 pasal 22.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 06 Tahun 2013 Pasal 21.

Surat Keputusan Nomor: 386/01/21/647783/VIII/2015 Tentang penetapan kelompok penerima BSPS Tahun anggaran 2015 di Kelurahan Way Halim Permai.

Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000, Pasal 28H Ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 40 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.